

P-RENJA TAHUN 2023

Jl. Veteran No 10 Kota Blitar, Jawa Timur
Website : <https://dpmptsp.blitarkab.go.id/>

KATA PENGANTAR

Puji Syukur kita panjatkan kehadirat Allah SWT, karena atas rahmat dan perkenan-Nya maka Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah (P-Renja PD) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Blitar Tahun 2023 ini dapat diselesaikan.

Penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja-PD) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Blitar Tahun 2023 merupakan kewajiban daerah sebagaimana amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Guna memenuhi kewajiban tersebut dan dalam rangka melaksanakan salah satu fungsi manajemen pemerintahan di bidang penyelenggaraan pemerintahan khususnya dalam hal pelayanan publik maka perlu kiranya disusun P-Renja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Blitar Tahun 2023 sebagai tindak lanjut dan evaluasi pada program/kegiatan tahun anggaran 2022 dan 2023 sampai dengan triwulan II. Dengan disusunnya P-Renja 2023 tersebut maka dapat diketahui secara pasti arah program dan kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Blitar sampai dengan akhir tahun atas dasar evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan pada tahun berjalan.

Dengan telah tersusunnya P-Renja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Blitar Tahun 2023 ini diharapkan dapat dijadikan pedoman bagi segenap personil yang ada pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Blitar dalam mengemban tugasnya dan memberikan pelayanan kepada masyarakat di Kabupaten Blitar sebagaimana yang tertuang dalam Visi dan Misi Bupati yang telah ditetapkan.

Blitar, Agustus 2023



NIP. 19701111 198903 1 004

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	iii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Landasan Hukum	2
1.3 Maksud dan Tujuan.....	3
1.4 Sistematika Penulisan.....	4
BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PD SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN BERKENAAN	5
2.1 Analisis Kinerja Pelayanan PD.....	5
2.2 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi PD.....	7
2.3 Evaluasi Pelaksanaan Renja PD	8
BAB III RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH	21
3.1 Rencana Kerja.....	21
3.1.1 Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah.....	21
3.1.2 Indikator Kinerja Perangkat Daerah	22
3.2 Pendanaan.....	26
BAB IV PENUTUP	30
LAMPIRAN	31

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

P-Renja PD adalah dokumen perencanaan PD yang memuat kebijakan, program dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintahan daerah maupun yg ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat. P-Renja PD merupakan sebuah dokumen rencana resmi daerah yang dipersyaratkan untuk mengarahkan program dan kegiatan pelayanan PD khususnya, dan pembangunan daerah pada umumnya. P-Renja PD memiliki fungsi yang sangat fundamental dalam sistem perencanaan daerah, karena P-Renja PD merupakan produk perencanaan pada unit organisasi pemerintah terendah dan terkecil. P-Renja PD berhubungan langsung dengan pelayanan pada masyarakat yang merupakan tujuan utama penyelenggaraan pemerintahan daerah. Kualitas penyusunan P-Renja PD sangatlah menentukan pada kualitas pelayanan pada publik.

Proses penyusunan P-Renja PD dimulai dengan persiapan evaluasi pada P-Renja PD dengan menganalisa kegiatan-kegiatan yang sudah berjalan. Menganalisis gambaran pelayanan PD sehingga perumusan tujuan dan sasaran yang dihasilkan lebih efektif dalam penyerapan berdasarkan review hasil evaluasi P-Renja PD tahun berjalan.

Dalam proses penyusunan perencanaan tersebut perlu melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan agar pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada dapat secara optimal meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Sementara itu paralel dengan pembuatan P-RKPD sesuai dengan pasal 7 UU Nomor 25 tahun 2004 juga mewajibkan setiap SKPD membuat dan memiliki P-Renja PD, yang disusun dengan berpedoman kepada Renstra PD dan mengacu kepada P-RKPD. Sedangkan RKPD dijadikan dasar penyusunan Rancangan APBD, Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS).

P-RKPD Tahun 2023 berfungsi sebagai dokumen perencanaan tahunan Pemerintah Daerah. Sesuai amanat tersebut maka DPMPTSP Kabupaten Blitar sebagai Satuan Kerja Perangkat Daerah pada tahun 2023 ini menyusun P-Renja PD tahun 2023. P-Renja PD DPMPTSP Kabupaten Blitar merupakan dokumen rencana pembangunan DPMPTSP yang berjangka waktu 1 (satu) tahun guna

mengoperasionalkan P-RKPD yang disertai dengan upaya mempertahankan dan meningkatkan capaian kinerja pelayanan masyarakat yang sudah dicapai oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

P-Renja PD DPMPTSP Kabupaten Blitar tahun 2023 akan dijadikan sebagai pedoman dan rujukan dalam menyusun program, kegiatan, dan sub kegiatan DPMPTSP Kabupaten Blitar pada tahun 2023.

Keterkaitan P-Renja PD dengan dokumen P-RKPD dan Renstra PD merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan karena di dalam P-Renja PD merupakan penjabaran dan adanya hubungan keselarasan dengan dokumen daerah yang ada di atasnya seperti RPJMD, Renstra PD dan P-RKPD.

1.2 Landasan Hukum

Dasar Hukum penyusunan P-Renja PD DPMPTSP Kabupaten Blitar Tahun 2023 adalah:

1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014, tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5578), sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

5. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
6. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Blitar Nomor 2 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Blitar Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Blitar Tahun 2021 Nomor 2/E, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Blitar Nomor 61);
8. Peraturan Bupati Blitar Nomor 80 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Blitar Nomor 9 Tahun 2019 tentang Penanaman Modal;
9. Peraturan Bupati Blitar Nomor 67 Tahun 2019 tentang Rencana Umum Penanaman Modal Kabupaten Blitar Tahun 2019 – 2039;
10. Peraturan Bupati Blitar Nomor 76 Tahun 2022 tentang Pendelegasian Wewenang Perizinan dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Blitar (Berita Daerah Kabupaten Blitar Tahun 2022 Nomor 76/E);
11. Peraturan Bupati Blitar Nomor 111 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Blitar.

1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud disusunnya P-Renja PD DPMPTSP Kabupaten Blitar Tahun 2023 adalah untuk menghasilkan acuan bagi arah kebijakan dan pelaksanaan program, kegiatan, dan sub kegiatan dalam perencanaan PD setelah adanya anggaran kegiatan, serta menggambarkan target capaian kinerja yang dapat ditransformasikan ke dalam P-Renja PD dan RKA-P PD. Sedangkan Tujuan penyusunan P-Renja PD DPMPTSP Kabupaten Blitar adalah:

1. Mendeskripsikan tentang program-program dan kegiatan oleh DPMPTSP Kabupaten Blitar beserta pendanaan yang dibutuhkan dalam pelaksanaannya;
2. Menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi dan sinergi antara P-Renja PD dengan visi misi pembangunan jangka menengah Kabupaten Blitar;

3. Menjamin terciptanya pemanfaatan seluruh sumber daya yang ada pada PD secara efisien, efektif dan berkelanjutan;
4. Sebagai panduan dan pedoman bagi PD dalam melaksanakan program dan kegiatan yang telah dirumuskan.

1.4 Sistematika Penulisan

Secara garis besar, sistematika isi P-Renja PD Tahun 2023 adalah sebagai berikut:

KATA PENGANTAR

DAFTAR ISI

BAB I. PENDAHULUAN

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Landasan Hukum
- 1.3 Maksud dan Tujuan
- 1.4 Sistematika Penulisan

BAB II. EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PD SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN BERKENAAN

- 2.1 Analisis Kinerja Pelayanan PD
- 2.2 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD
- 2.3 Evaluasi Pelaksanaan Renja PD sampai dengan Triwulan II

BAB III. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

- 3.1 Rencana Kerja
 - 3.1.1 Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah
 - 3.1.2 Indikator Kinerja Perangkat Daerah
- 3.2 Pendanaan

BAB IV. PENUTUP

LAMPIRAN

BAB II

**EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PD SAMPAI DENGAN
TRIWULAN II TAHUN BERKENAAN**

2.1 Analisis Kinerja Pelayanan PD

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Blitar memiliki 3 (tiga) Indikator Kinerja Utama (IKU) dan 1 (satu) Indikator Kinerja Kunci (IKK) sesuai Peraturan Kemendagri No 18 Tahun 2020. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Blitar telah melaksanakan tugas pokok dan fungsinya sebagai lembaga teknis daerah di Kabupaten Blitar untuk melaksanakan urusan penanaman modal. Dalam melaksanakan program dan kegiatan yang bersifat administratif maupun bersifat teknis secara proposional telah berjalan dengan baik. Indikator keberhasilan terhadap pelaksanaan tugas ini adalah adanya komitmen kerja yang baik antara Kepala Dinas beserta bawahannya dan penguasaan di bidang tugas masing-masing pegawai dengan baik. Berikut merupakan sasaran strategis dan program yang dilaksanakan DPMPSTP Kabupaten Blitar pada tahun 2023:

1. Sasaran ***Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah***, yang dicapai melalui pelaksanaan Program:
 - 1) Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
2. Sasaran ***Meningkatnya Kepuasan Masyarakat atas Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan***, yang dicapai melalui pelaksanaan Program:
 - 1) Program Pelayanan Penanaman Modal;
 - 2) Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal
3. Sasaran ***Meningkatnya Realisasi Investasi di Kabupaten Blitar***, yang dicapai melalui pelaksanaan Program:
 - 1) Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal;
 - 2) Program Promosi Penanaman Modal;
 - 3) Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal.

Analisis pencapaian kinerja pelayanan DPMPSTP Kabupaten Blitar berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan program kegiatan tahun 2023 sampai dengan triwulan II dijelaskan sebagai berikut:

1. Nilai dan Predikat SAKIP Perangkat Daerah tahun 2023 dengan target 79,75 terealisasi 75,21 dengan predikat BB capaian kinerjanya adalah 94,31%. Sementara tahun 2022 target nilai SAKIP adalah 79,50 terealisasi 70,34 dengan predikat BB capaiannya adalah 88,48%.
2. Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) atas Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan tahun 2023 dengan target 87 terealisasi 87,89 sampai dengan triwulan II; sedangkan IKM pada tahun 2022 dengan target 85 terealisasi 90,59 dengan tingkat capaian 106,58%.
3. Persentase Peningkatan Realisasi Investasi di Kabupaten Blitar Tahun 2023 dengan target 20% sampai dengan triwulan II sebesar -16,24% dengan investasi 1.444 Miliar sehingga total akumulasi realisasi investasi dari tahun 2017 sampai dengan 2023 triwulan II sebesar 13.218 Miliar; Sedangkan di tahun 2022 dengan target 20% terealisasi 34,90% dengan tingkat capaian 174,50%.

Tabel 2.1.1

Tabel Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target Akhir Periode Renstra

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET AKHIR RENSTRA (2026)	TARGET 2023	REALISASI 2023 sd TW II
1.	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Nilai dan Predikat SAKIP Perangkat Daerah	80,50 dan A	79,75 dan BB	75,21
2.	Meningkatnya Kepuasan Masyarakat atas Pelayanan Perizinan dan non perizinan	Indeks Kepuasan Masyarakat atas Pelayanan Perizinan dan non Perizinan	93	87	87,89
3.	Meningkatnya Realisasi Investasi di Kabupaten Blitar	Persentase Peningkatan Realisasi Investasi Kabupaten Blitar	20%	20%	-16,24%

Tabel 2.1.2

**Pencapaian Kinerja Pelayanan
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Blitar**

No	Indikator	SPM /Standar Nasional	IKK	Target Renstra PD				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
1	Tercapainya Realisasi Penanaman Modal		Tercapainya Realisasi Penanaman Modal	9700 M	10700 M	13500 M	13700 M	10050 M	11774 M	13500 M	14700 M	Tahun 2022 s/d TW II : 940M

3.1.1 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi PD

Dalam Melaksanakan tugas dan fungsi PD Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu mengevaluasi realisasi kinerja tahun berjalan sampai dengan triwulan II. Evaluasi Realisasi Kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Blitar tahun 2023 sampai dengan triwulan II dimaksudkan untuk mengetahui apakah sasaran strategis dan capaiannya telah sesuai dengan perencanaan Jangka Menengah OPD.

DPMPTSP mendukung **Misi Bupati yang ketiga** yaitu pengoptimalan kinerja pemerintah yang akuntabel, inovatif dan berintegritas dan **Misi Bupati yang keempat** yaitu percepatan dan pemerataan pembangunan yang adil dan merata melalui pengembangan potensi ekonomi daerah dengan mengedepankan pemberdayaan masyarakat dan kelestarian lingkungan. Indikator Kinerja Utama yang ada di DPMPTSP sudah mendukung pencapaian Misi Bupati.

Dalam pemenuhan target Indikator Kinerja Utama ada beberapa kendala yang dihadapi menyebabkan target yang direncanakan tidak tercapai. **Pada Tahun 2023 ini kendala yang dihadapi adalah sebagai berikut :**

- 1) Ada beberapa dokumen yang belum sesuai sehingga mempengaruhi Nilai SAKIP menurun;
- 2) Integrasi sistem Kementerian dalam OSS sering bermasalah sehingga menghambat pelayanan;
- 3) Setiap perubahan implementasi OSS tidak disosialisasikan oleh BKPM ke daerah dengan jelas sehingga mengundang permasalahan dengan pelaku usaha;

Adapun solusi yang digunakan untuk mengatasi kendala-kendala tersebut di atas adalah:

- 1) Melakukan perbaikan dan pemenuhan dokumen SAKIP;
- 2) Mengkoordinasikan dan mengkonsultasikan masalah dengan BKPM;
- 3) Terus meningkatkan sarana dan prasarana teknologi IT dalam memperlancar perizinan;
- 4) Terus melakukan koordinasi dan peningkatan SDM yang dilakukan secara virtual atau online;

Isu Strategis Tahun 2023:

- 1) Potensi wisata alam dan buatan;
- 2) Potensi SDM (angkatan kerja tinggi);
- 3) Potensi Sumber Daya Alam (Kelapa dll);

- 4) JLS sudah terhubung dari Pantai Tambak-Kecamatan Wonotirto ke Pantai Serang-Kecamatan Panggungrejo;
- 5) Rencana pembangunan TOL;

Permasalahan:

- 1) Letak geografis Kabupaten Blitar tidak berada pada jalur utama perdagangan dan industri;
- 2) Masyarakat Kabupaten Blitar tidak terlalu antusias terhadap industri besar.

Prioritas Pembangunan Tahun 2023:

- 1) Meningkatkan Promosi Investasi di Bidang Pariwisata;
- 2) Meningkatkan Promosi Investasi di Bidang Industri Ramah Lingkungan.

Langkah-langkah/strategi Tahun 2023:

- 1) Menyusun IPRO sektor pariwisata, IPRO sektor Industri berbasis dasar Sumber Daya Alam yang potensial di Kabupaten Blitar seperti Pohon Kelapa menjadi Gula Palem;
- 2) Meningkatkan Koordinasi dengan Perangkat Daerah terkait (Bappeda Litbang, Disperindag, Dinkop, Disnaker, Dinas Pertanian) untuk menyusun perencanaan peta investasi dan software pendukung (peraturan perundangan tentang ketenagakerjaan dan perencanaan investasi);
- 3) Meningkatkan Promosi Investasi;
- 4) Meningkatkan Kemudahan Berusaha.

3.1.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja PD sampai dengan Triwulan II

Pada Tahun 2023 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu melaksanakan urusan penanaman modal melalui 6 (enam) program, 13 (tiga belas) kegiatan dan 31 (tiga puluh satu) sub kegiatan. Untuk melaksanakan program/kegiatan/sub kegiatan tersebut Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Blitar mendapat pagu sebesar Rp. 6.061.626.000,- sampai dengan triwulan II realisasi sebesar Rp. 2.139.087.663,- atau 35,29%. Dengan demikian jumlah pagu anggaran yang belum diserap sebesar Rp. 3.922.538.337,-, atau 64,71%.

Dalam pelaksanaan program dan kegiatan Tahun 2023 sampai dengan triwulan II dijelaskan sebagai berikut:

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota secara keseluruhan kegiatan dapat dilaksanakan, hanya untuk kegiatan rehab gedung dilaksanakan pada triwulan III karena salah rekening belanja;
2. Pada Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal untuk kebijakan penetapan fasilitas/insentif dalam proses penyusunan karena tahun 2022 tidak dapat dilaksanakan, untuk peta potensi dan peluang investasi dalam proses penyusunan IPRO, regulasi RUPM juga dalam proses penyusunan revidi dokumen, sehingga untuk output program dan kegiatan belum dapat terpenuhi;
3. Program Promosi Penanaman Modal dilaksanakan pada triwulan III untuk kegiatan promosi, sedangkan untuk kegiatan penyusunan dokumen Peraturan Daerah Strategi Promosi belum dapat dilaksanakan;
4. Pada Program Pelayanan Penanaman Modal, jumlah izin yang diterbitkan sampai dengan triwulan II sebesar -38,57% dengan jumlah izin yang diterbitkan sebesar 7.326 izin sedangkan jumlah izin yang terlayani sebesar 7.742 izin;
5. Pada Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal dapat dilaksanakan sesuai target untuk pelaksanaan monev pengawasan, pemantauan dan pembinaan terhadap perusahaan atau pelaku usaha. Untuk realisasi investasi sampai dengan triwulan II sebesar 1.444 Miliar. Sehingga jumlah realisasi investasi dari tahun 2017 sd. Tahun 2023 triwulan II adalah sebesar 13.218 Miliar (dengan rincian realisasi investasi sd. 2022 sebesar 11.774 Miliar);
6. Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal sudah disusun dokumen laporan data perizinan, non perizinan dan penanaman modal pada semester I.

Tabel 2.1.1

**Evaluasi Terhadap Hasil Renja Perangkat Daerah Lingkup Kabupaten/Kota
Renja Perangkat Daerah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Blitar
Periode Pelaksanaan 2023 s/d Triwulan II**

No	Sasaran	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program(Outcome) / Kegiatan(Output) / Sub Kegiatan(Output)	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun 2022		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan (2023) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan						Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran P-Renja PD yang dievaluasi (2022)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Pada Tahun 2022 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2021		Tingkat Capaian dan Kinerja Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2022 (%)			Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
				5		6		7		8		9		10		11		12=8+9+10+11		13=(12/7)*100%		14=6+12		15= (14/5) *100 (Ki & Kr) Rp= 14			
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	Kr	Rp	K	Rp	Ki		Kr	Rp
1	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rata-rata tingkat capaian kinerja kegiatan pada program penunjang urusan pemerintahan daerah	100	35.853.876.785	100	4.098.852.499	100	4.605.686.500	50	819.612.902	50	725.118.125	-	-	-	-	100	1.544.731.027	100	34	200	5.643.583.526	200	16	5.643.583.526	DPMP TSP
		Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang sesuai dengan peraturan	79	83.965.900	15	35.303.100	15	10.575.000	7	-	-	-	-	-	-	-	7	-	47	-	22	35.303.100	28	42	35.303.100	DPMP TSP
		Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan dan penganggaran yang disusun	50	48.775.900	10	30.303.200	10	5.575.500	5	-	-	-	-	-	-	-	5	-	50	-	15	30.303.200	30	62	30.303.200	DPMP TSP
		Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan	30	35.190.000	5	4.999.900	5	4.999.500	2	-	-	-	-	-	-	-	2	-	40	-	7	4.999.900	23	14	4.999.900	DPMP TSP

No	Sasaran	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program(Outcome) / Kegiatan(Output) / Sub Kegiatan(Output)	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun 2022		Target Kinerja Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan (2023) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran P-Renja PD yang dievaluasi (2022)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Pada Tahun 2022 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2021		Tingkat Capaian dan Kinerja Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2022 (%)			Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				5		6		7		8		9		10		11		12=8+9+10+11		13=(12/7)*100%		14=6+12		15= (14/5) *100 (Ki & Kr) Rp=14			
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	Kr	Rp	K	Rp	Ki	Kr	Rp	
1		Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD																								
		Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Administrasi Keuangan perangkat daerah yang tepat waktu	10	18.494.072.663	2	4.267.356.695	2	3.305.693.244	-	668.050.729	1	616.532.741	-	-	-	-	1	1.284.583.470	50	39	3	5.551.940.165	30	30	5.551.940.165	DPMP TSP
		Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	150	18.300.845.013	26	2.944.791.365	30	3.276.893.244	26	668.050.729	-	608.822.741	-	-	-	-	26	1.276.873.470	87	39	52	4.221.664.835	35	23	4.221.664.835	DPMP TSP
		Sub Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	60	193.227.650	9	37.760.000	12	28.800.000	3	-	3	7.710.000	-	-	-	-	6	7.710.000	50	27	15	45.470.000	25	24	45.470.000	DPMP TSP
		Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah waktu pelaksanaan administrasi umum yang akuntabel	60	2.188.993.322	12	176.480.950	12	267.132.100	3	22.931.895	3	29.592.620	-	-	-	-	6	52.524.515	50	20	18	229.005.465	30	10	229.005.465	DPMP TSP
		Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan	5	97.000.000	1	3.928.000	1	3.904.500	-	-	-	450.000	-	-	-	-	-	450.000	-	12	1	4.378.000	20	5	4.378.000	DPMP TSP

No	Sasaran	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output) / Sub Kegiatan (Output)	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun 2022		Target Kinerja Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan (2023) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan						Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran P-Renja PD yang dievaluasi (2022)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Pada Tahun 2022 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2021		Tingkat Capaian dan Kinerja Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2022 (%)			Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
				5		6		7		8		9		10		11		12=8+9+10+11		13=(12/7)*100%		14=6+12		15= (14/5) *100 (Ki & Kr) Rp=14			
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	Kr	Rp	K	Rp	Ki		Kr	Rp
1		Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya	60	920.810.000	5	87.605.925	5	72.210.000	1	22.331.770	-	-	-	-	-	-	1	22.331.770	20	31	6	109.937.695	10	12	109.937.695	DPMP TSP
		Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya yang dipelihara	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang dipelihara	400	384.429.900	60	50.810.000	80	70.898.000	10	6.300.000	20	4.800.000	-	-	-	-	30	11.100.000	38	16	90	61.910.000	23	16	61.910.000	DPMP TSP
		Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/di rehabilitasi	10	4.620.000.000	2	233.870.000	2	256.059.600	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	233.870.000	20	5	233.870.000	DPMP TSP
2	Meningkatnya Realisasi Investasi di Kabupaten Bitar	Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal	Persentase peningkatan penanam modal yang mendapatkan fasilitas/inseentif dan kemudahan penanaman modal	0,02	1.973.035.030	0	270.503.894	0,02	325.354.800	-	1.866.000	-	-	-	-	-	-	1.866.000	-	1	-	272.369.894	-	14	272.369.894	DPMP TSP	
		Kegiatan Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif di Bidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	jumlah penanam modal yang mendapatkan fasilitas/inseentif dan kemudahan penanaman modal	10	568.912.299	0	75.132.500	2	68.374.000	-	1.866.000	-	-	-	-	-	-	-	1.866.000	-	3	-	76.998.500	-	14	76.998.500	DPMP TSP

No	Sasaran	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program(Outcome) / Kegiatan(Output) / Sub Kegiatan(Output)	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun 2022		Target Kinerja Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan (2023) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan						Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran P-Renja PD yang dievaluasi (2022)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Pada Tahun 2022 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2021		Tingkat Capaian dan Kinerja Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2022 (%)			Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
				5		6		7		8		9		10		11		12=8+9+10+11		13=(12/7)*100%		14=6+12		15= (14/5) *100 (Ki & Kr) Rp=14			
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	Kr	Rp	K	Rp	Ki	Kr	Rp			
1		Sub Kegiatan Penetapan Kebijakan Daerah mengenai Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	Jumlah Peraturan Daerah/Provisi dalam Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	5	423.529.466	1	71.802.500	1	50.734.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	71.802.500	20	17	71.802.500	DPMP TSP		
		Sub Kegiatan Evaluasi Pelaksanaan Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	Jumlah kegiatan usaha dari pelaku usaha yang memperoleh insentif dan kemudahan berusaha di daerah	10	145.382.833	-	-	2	17.640.000	-	1.866.000	-	-	-	-	-	1.866.000	-	11	-	1.866.000	-	1	1.866.000	DPMP TSP		
		Kegiatan Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen terkait peta potensi investasi	10	1.404.122.731	0	195.371.394	2	256.980.800	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	195.371.394	-	14	195.371.394	DPMP TSP		
		Sub Kegiatan Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah peraturan daerah (perda) rencana umum penanaman modal daerah kabupaten/kota	5	474.400.000	1	70.150.000	1	31.118.800	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	70.150.000	20	15	70.150.000	DPMP TSP		
		Sub Kegiatan Penyediaan peta potensi investasi dan peluang usaha kabupaten/kota	Jumlah peta potensi investasi dan peluang usaha kabupaten/kota	5	929.722.731	2	123.171.394	2	225.862.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	123.171.394	40	13	123.171.394	DPMP TSP		

No	Sasaran	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program(Outcome) / Kegiatan(Output) / Sub Kegiatan(Output)	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun 2022		Target Kinerja Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan (2023) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran P-Renja PD yang dievaluasi (2022)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Pada Tahun 2022 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2021		Tingkat Capaian dan Kinerja Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2022 (%)			Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				5		6		7		8		9		10		11		12=8+9+10+11		13=(12/7)*100%		14=6+12		15= (14/5) *100 (Ki & Kr) Rp=14			
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	Kr	Rp	K	Rp	Ki	Kr	Rp	
1		Program Promosi Penanaman Modal	Peningkatan jumlah sektor usaha yg dipromosikan	10	3.180.435.117	0	469.882.650	2	424.843.800	-	7.146.000	-	-	-	-	-	-	7.146.000	-	2	-	477.028.650	-	15	477.028.650	DPMP TSP	
		Kegiatan Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Peningkatan kegiatan promosi investasi	50	3.180.435.117	1	469.882.650	1	424.843.800	-	7.146.000	-	-	-	-	-	-	7.146.000	-	2	1	477.028.650	2	15	477.028.650	DPMP TSP	
		Sub Kegiatan Penyusunan strategi promosi penanaman modal	Jumlah peraturan daerah yang mengatur promosi penanaman modal kewenangan kabupaten/kota	5	722.775.849	0	112.721.650	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	#DIV/0!	-	112.721.650	-	16	112.721.650	DPMP TSP	
		Sub Kegiatan Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah/Kabupaten	Jumlah dokumen hasil kegiatan promosi penanaman modal kabupaten/kota	10	2.457.659.268	2	332.926.500	2	424.843.800	-	7.146.000	-	-	-	-	-	-	7.146.000	-	2	2	340.072.500	20	14	340.072.500	DPMP TSP	
3	Meningkatnya Kepuasan Masyarakat atas	Program Pelayanan Penanaman Modal	Persentase peningkatan jumlah izin yang diterbitkan	5	2.031.371.005	22,55	535.400.320	5	178.516.200	68,64	5.760.000	-	78,83	8.215.000	-	-	-	13.975.000	(147)	8	(125)	549.375.320	(2,498)	27	549.375.320	DPMP TSP	

No	Sasaran	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output) / Sub Kegiatan (Output)	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun 2022		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan (2023) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan						Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran P-Renja PD yang dievaluasi (2022)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Pada Tahun 2022 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2021		Tingkat Capaian dan Kinerja Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2022 (%)			Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab				
				5		6		7		8		9		10		11		12=8+9+10+11		13=(12/7)*100%		14=6+12		15= (14/5) *100 (Ki & Kr) Rp=14					
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	Kr	Rp	K	Rp	Ki		Kr	Rp		
1	Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan	Kegiatan Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan Secara Terpadu Satu Pintu Dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	Persentase peningkatan jumlah perizinan usaha yang terlayani	5	2.031.371.005	28,76	535.400.320	5	178.516.200	-	69,62	5.760.000	-	79,20	8.215.000	-	-	-	-	(149)	13.975.000	(2,976)	8	(120)	549.375.320	(2,401)	27	549.375.320	DPMP TSP
		Sub Kegiatan Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non-Perizinan berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Jumlah pelaku usaha yang mendapatkan pelayanan terpadu perizinan dan non perizinan berbasis sistem pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik	50.000	828.481.705	125,51	415.794.000	10.000	148.108.800	3,813	5.280.000	2,611	8.215.000	-	-	-	-	6,424	13.495.000	64	9	18,975	429.289.000	38	52	429.289.000	DPMP TSP		
		Sub Kegiatan Pemantauan Pemenuhan Komitmen Perizinan dan Non-Perizinan Penanaman Modal	Jumlah kegiatan usaha dari pelaku usaha yang mendapat pemantauan pemenuhan komitmen perizinan berusaha dan non perizinan penanaman modal	250	282.889.300	35	41.157.412	50	12.519.900	46,7	480.000	310	-	-	-	-	-	777	480.000	1,554	4	812	41.637.412	325	15	41.637.412	DPMP TSP		

No	Sasaran	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output) / Sub Kegiatan (Output)	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun 2022		Target Kinerja Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan (2023) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan						Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran P-Renja PD yang dievaluasi (2022)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Pada Tahun 2022 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2021		Tingkat Capaian dan Kinerja Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2022 (%)			Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
				5		6		7		8		9		10		11		12=8+9+10+11		13=(12/7)*100%		14=6+12		15= (14/5) *100 (Ki & Kr) Rp= 14			
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	Kr	Rp	K	Rp	Ki		Kr	Rp
1		Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal	Jumlah pelaku usaha yang mendapatkan pembinaan pelaksanaan penanaman modal	1.275	1.728.500.000	260	217.055.295	255	269.835.000	-	11.883.502	3	2.485.834	-	-	-	-	3	14.369.336	1	5	263	231.424.631	21	13	231.424.631	DPMP TSP
			Jumlah kegiatan usaha dari pelaku usaha yang melakukan koordinasi dan sinkronisasi pengawasan	125	1.251.865.274	53	60.393.718	25	71.007.300	-	680.000	3	-	-	-	-	-	-	3	680.000	12	1	56	61.073.718	45	5	61.073.718
5	Meningkatnya Kepuasan Masyarakat atas Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan	Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal	persentase data yang tersedia tepat waktu	100	812.744.223	100	111.870.224	100	176.982.400	-	1.723.000	50	-	-	-	-	-	50	1.723.000	50	1	150	113.593.224	150	14	113.593.224	DPMP TSP
		Kegiatan Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Nonperizinan yang Terintegrasi Pada Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	jumlah laporan data perizinan, non perizinan dan penanaman modal	10	812.744.233	2	111.870.224	2	176.982.400	-	1.723.000	1	-	-	-	-	-	1	1.723.000	50	1	3	113.593.224	30	14	113.593.224	DPMP TSP
		Sub Kegiatan Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan dan Nonperizinan berbasis Sistem Pelayanan	Jumlah data dan informasi perizinan dan non perizinan berbasis sistem pelayanan perizinan berusaha	20	812.744.223	4	111.870.224	4	176.982.400	-	1.723.000	2	-	-	-	-	-	2	1.723.000	50	1	6	113.593.224	30	14	113.593.224	DPMP TSP

No	Sasaran	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program(Outcome) / Kegiatan(Output) / Sub Kegiatan(Output)	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun 2022		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan (2023) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan						Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran P-Renja PD yang dievaluasi (2022)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Pada Tahun 2022 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2021		Tingkat Capaian dan Kinerja Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2022 (%)			Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	Kr	Rp	K	Rp	Ki	Kr	Rp			
1		Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	terintegrasi secara elektronik yang diolah, dikaji dan dimanfaatkan																								
Jumlah				47.276.380.038	5.774.230.455	6.061.626.000	847.991.404	735.818.959							1.583.810.363					7.358.040.818				7.358.040.818			
Faktor Pendorong Keberhasilan Kinerja				- Pada Sub Kegiatan Pemenuhan Komitmen, Realisasi besar karena pemenuhan komitmen atau pemenuhan persyaratan bisa dilakukan melalui sistem OSS secara online maupun visitasi langsung ke pelaku usaha																							
Faktor Penghambat Capaian Kinerja				-																							
Tindak Lanjut yang Diperlukan dalam triwulan berikutnya				- Kegiatan yang belum dilaksanakan atau belum pencairan akan segera dilaksanakan kegiatan pada Triwulan III																							
Tindak Lanjut yang Diperlukan dalam RKPD berikutnya				- Mengusulkan perubahan indikator, target, dan pagu anggaran pada RKPD Perubahan Tahun 2023; - Ada beberapa indikator sub kegiatan yang belum sesuai dengan Kepmendagri 050-889 Tahun 2021; - Ada indikator kegiatan yang sulit untuk diukur sehingga dirubah pada Renstra Perubahan 2021-2026 dan akan diusulkan untuk dirubah pada RKPD P Tahun 2023																							

Blitar, Agustus 2023
 Kepala DPMPTSP Kabupaten Blitar

PUGUH IMAM SUSANTO, S.Sos., M.Si
 Pembina Utama Muda
 NIP. 19701111 198903 1 004

BAB III

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

3.1 Rencana Kerja

Rencana Kerja Perangkat Daerah DPMPTSP Kabupaten Blitar menjadi dokumen rencana tahunan yang memuat rancangan program, kegiatan dan sub kegiatan. Dokumen Rencana Kerja Perangkat Daerah DPMPTSP Kabupaten Blitar disusun dengan merujuk pada dokumen Renstra DPMPTSP Kabupaten Blitar Tahun 2021-2026 dan RKPD Kabupaten Blitar Tahun 2023.

Sesuai rencana pembangunan daerah dalam dokumen tersebut Visi Kabupaten Blitar periode tahun 2021-2026 yaitu: *“TERWUJUDNYA KABUPATEN BLITAR YANG MANDIRI DAN SEJAHTERA BERLANDASKAN AKHLAK MULIA, BALDATUN, TOYYIBATUN, WAROBBUN GHOFUR”*.

Untuk mewujudkan Visi Kabupaten Blitar tersebut maka Misi Pembangunan Kabupaten Blitar Tahun 2021-2026 ditetapkan sebagai berikut:

1. Meningkatkan Kesejahteraan Sosial Masyarakat Blitar Berlandaskan Iman dan Takwa dengan Kearifan Lokal Budaya;
2. Meningkatkan Taraf Hidup Masyarakat Blitar yang Memiliki Mutu dan Nilai Kompetensi Tinggi, Dengan Mengoptimalkan potensi Generasi Muda Kabupaten Blitar;
3. Pengoptimalan Kinerja Pemerintah yang Akuntabel, Inovatif dan Berintegritas;
4. Percepatan dan Pemerataan Pembangunan yang Adil dan Merata melalui Pengembangan Potensi Ekonomi Daerah dengan Mengedepankan Pemberdayaan Masyarakat dan Kelestarian Lingkungan;

Dari 4 (empat) Misi tersebut yang sesuai dengan tugas pokok dan Fungsi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Blitar adalah mengacu pada misi ketiga dan keempat.

3.1.1 Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah

Tujuan dan sasaran yang ingin dicapai oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Blitar untuk mewujudkan visi dan misi Kabupaten Blitar adalah sebagai berikut:

Tabel 3.1.1

Tujuan dan Sasaran DPMPTSP Kabupaten Blitar

Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan Dan Sasaran	Target
Meningkatkan Iklim Investasi di Kabupaten Blitar		ICOR	5,73
	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Nilai dan Predikat SAKIP Perangkat Daerah	79,75 dan BB
	Meningkatnya Kepuasan Masyarakat atas Pelayanan Perizinan dan non perizinan	Indeks Kepuasan Masyarakat atas pelayanan perizinan dan non perizinan	87
	Meningkatnya Realisasi Investasi di Kabupaten Blitar	Persentase Peningkatan Realisasi Investasi Kabupaten Blitar	20

Untuk mencapai tujuan dan sasaran strategis DPMPTSP Kabupaten Blitar, beberapa strategi yang dilakukan adalah sebagai berikut:

- 1) Peningkatan Kualitas Pelayanan Perizinan dan non Perizinan;
- 2) Pelaksanaan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan secara online;
- 3) Peningkatan dan pengelolaan kantor dalam mendukung efisiensi dan efektivitas kinerja pegawai;
- 4) Penerapan Kebijakan;
- 5) Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal;
- 6) Penyelenggaraan Kerjasama Pemerintah Daerah dan Badan Usaha.

3.1.2 Indikator Kinerja Perangkat Daerah

Indikator kinerja perangkat daerah DPMPTSP Kabupaten Blitar ditampilkan pada tabel berikut :

Tabel 3.1.2

Indikator Kinerja Perubahan DPMPTSP Kabupaten Blitar Tahun 2023

NO	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN PERUBAHAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	
			RENJA 2023	P-RENJA 2023
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rata-rata tingkat capaian kinerja kegiatan pada program penunjang urusan pemerintahan daerah	100%	100%
	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang sesuai dengan peraturan	15 Dokumen	16 Dokumen
	Sub Kegiatan Penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	10 Dokumen	10 Dokumen
	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	5 Dokumen	6 Dokumen
	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Administrasi Keuangan perangkat daerah yang tepat waktu	2 Laporan	2 Laporan
	Sub Kegiatan Penyediaan gaji dan tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	30 Orang/Bulan	30 Orang/Bulan
	Sub Kegiatan Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 Dokumen	12 Dokumen
	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah waktu pelaksanaan administrasi umum yang akuntabel	12 Bulan	12 Bulan
	Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan	1 Paket	1 Paket
	Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan Dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	2 Paket
	Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket	1 Paket
	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang disediakan	1 Paket	1 Paket
	Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	-	1 Paket	-
	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	360 Dokumen	360 Dokumen
	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	25 Laporan	50 Laporan
	Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah jenis Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	4 Jenis	4 Jenis

NO	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN PERUBAHAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	
			RENJA 2023	P-RENJA 2023
	Sub Kegiatan Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel Yang Disediakan	1 Paket	10 Unit
	Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan Dan Mesin Lainnya Yang Disediakan	8 Unit	8 Unit
	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah waktu Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	12 Bulan	12 Bulan
	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2 Laporan	2 Laporan
	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	2 Laporan	2 Laporan
	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	2 Laporan	12 Laporan
	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Waktu Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	12 Bulan	12 Bulan
	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	5 Unit	5 Unit
	Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang dipelihara	80 Unit	80 Unit
	Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 Unit	2 Unit
2	Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal	Persentase peningkatan penanam modal yang mendapatkan fasilitas/insentif dan kemudahan penanaman modal	0,02%	0,02%
	Kegiatan Penetapan pemberian fasilitas/insentif di Bidang Penanaman Modal yang menjadi kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah penanam modal yang mendapatkan fasilitas/insentif dan kemudahan penanaman modal	2 Investor	2 Investor
	Sub Kegiatan Penetapan Kebijakan Daerah mengenai Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	Jumlah Peraturan Daerah/Provinsi dalam Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	1 Dokumen	1 Dokumen
	Sub Kegiatan Evaluasi Pelaksanaan Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Memperoleh Insentif dan Kemudahan Berusaha di Daerah	2 Kegiatan Usaha	2 Kegiatan Usaha
	Kegiatan Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen terkait peta potensi investasi	1 Dokumen	2 Dokumen
	Sub Kegiatan Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Peraturan Daerah (perda) Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	1 Dokumen	1 Dokumen
	Sub Kegiatan Penyediaan peta potensi dan peluang investasi Kabupaten/kota	Jumlah Peta Potensi Investasi dan Peluang Usaha Kabupaten/Kota	2 Dokumen	1 Dokumen
3	Program Promosi Penanaman Modal	Peningkatan jumlah sektor usaha yg dipromosikan	2 Sektor Usaha	2 Sektor Usaha

NO	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN PERUBAHAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	
			RENJA 2023	P-RENJA 2023
	Kegiatan Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Peningkatan kegiatan promosi investasi	1 Kali	9 Kali
	Sub Kegiatan Penyusunan strategi promosi penanaman modal	Jumlah Peraturan Daerah yang Mengatur Promosi Penanaman Modal Kewenangan Kabupaten/Kota	1 Dokumen	1 Dokumen
	Sub Kegiatan Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah/Kabupaten	Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kabupaten/Kota	2 Dokumen	2 Dokumen
4	Program Pelayanan Penanaman Modal	Persentase peningkatan jumlah izin yang diterbitkan	5%	5%
	Kegiatan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Secara Terpadu Satu Pintu Dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase peningkatan jumlah perizinan usaha yang terlayani	5%	5%
	Sub Kegiatan Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	10.000 Pelaku Usaha	10.000 Pelaku Usaha
	Sub Kegiatan Pemantauan Pemenuhan Komitmen Perizinan dan Nonperizinan Penanaman Modal	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Mendapat Pemantauan Pemenuhan Komitmen Perizinan Berusaha dan Non Perizinan Penanaman Modal	50 Kegiatan Usaha	50 Kegiatan Usaha
	Sub Kegiatan Penyediaan layanan konsultasi dan Pengelolaan pengaduan masyarakat terhadap pelayanan terpadu perizinan dan non perizinan	Jumlah Orang yang Memperoleh Layanan Konsultasi dan Terkelolanya Pengaduan Masyarakat Terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan	5 Orang	5 Orang
5	Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	Jumlah Realisasi Investasi s.d. Tahun (n)	10.700 Milyar	13.500 Miliar
	Kegiatan Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang menjadi kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Proyek yang melaporkan kegiatan usahanya melalui LKPM	1600 Perusahaan	335 Proyek
	Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Pelaksanaan Penanaman Modal	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha Yang Melakukan Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Pelaksanaan Penanaman Modal	6 Kegiatan Usaha	6 Kegiatan Usaha
	Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal	Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal	255 Pelaku Usaha	255 Pelaku Usaha
	Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Melakukan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan	25 Kegiatan Usaha	25 Kegiatan Usaha
6	Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal	Persentase data yang tersedia tepat waktu	100%	100%

NO	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN PERUBAHAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	
			RENJA 2023	P-RENJA 2023
	Kegiatan Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi Pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah laporan data perizinan, non perizinan dan penanaman modal	2 Laporan	2 Laporan
	Sub Kegiatan Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Jumlah Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik yang Diolah, Dikaji dan Dimanfaatkan	4 Dokumen	4 Dokumen

3.2 Pendanaan

Pada perubahan anggaran tahun 2023, Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Blitar merencanakan 6 (enam) program, 13 (tiga belas) kegiatan, dan 35 (tiga puluh lima) sub kegiatan dengan pagu anggaran sebesar Rp. 6.061.626.000,- (*Enam Miliar Enam Puluh Satu Juta Enam Ratus Dua Puluh Enam Ribu Rupiah*) dengan rincian DAU/APBD Murni sebesar Rp. 5.748.626.000,- (*Lima Miliar Tujuh Ratus Empat Puluh Delapan Juta Enam Ratus Dua Puluh Enam Ribu Rupiah*) dan DAK Non Fisik sebesar Rp. 313.000.000,- (*Tiga Ratus Tiga Belas Juta Rupiah*) dimana keseluruhan anggaran bersumber dari APBD Kabupaten Blitar. Rancangan program, kegiatan dan sub kegiatan perubahan pada Perubahan Renja Tahun 2023 sesuai data yang terinput pada SIPD.

Tabel 3.2
Rekapitulasi Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan serta Pagu
berdasarkan P-RKPD Kabupaten Blitar Tahun 2023

NO	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN PERUBAHAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	ANGGARAN
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rata-rata tingkat capaian kinerja kegiatan pada program penunjang urusan pemerintahan daerah	100%	4.678.010.700
	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang sesuai dengan peraturan	16 Dokumen	10.575.000
	Sub Kegiatan Penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	10 Dokumen	5.575.500
	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	6 Dokumen	4.999.500
	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Administrasi Keuangan perangkat daerah yang tepat waktu	2 Laporan	3.305.693.520
	Sub Kegiatan Penyediaan gaji dan tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	30 Orang/Bulan	3.276.893.520
	Sub Kegiatan Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 Dokumen	28.800.000
	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah waktu pelaksanaan administrasi umum yang akuntabel	12 Bulan	391.506.700
	Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan	1 Paket	3.904.500
	Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan Dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	2 Paket	135.101.300
	Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket	5.488.900
	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang disediakan	1 Paket	8.370.000
	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	360 Dokumen	2.352.000
	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	50 Laporan	236.290.000
	Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah jenis Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	4 Jenis	160.971.200
	Sub Kegiatan Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel Yang Disediakan	10 Unit	16.717.000
	Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan Dan Mesin Lainnya Yang Disediakan	8 Unit	144.254.200
	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah waktu Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	12 Bulan	431.156.280
	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2 Laporan	2.741.800

NO	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN PERUBAHAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	ANGGARAN
	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	2 Laporan	81.158.480
	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	347.256.000
	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Waktu Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	12 Bulan	378.108.000
	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	5 Unit	72.210.000
	Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang dipelihara	80 Unit	70.898.000
	Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 Unit	235.000.000
2	Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal	Persentase peningkatan penanam modal yang mendapatkan fasilitas/insentif dan kemudahan penanaman modal	0,02%	298.309.600
	Kegiatan Penetapan pemberian fasilitas/insentif di Bidang Penanaman Modal yang menjadi kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah penanam modal yang mendapatkan fasilitas/insentif dan kemudahan penanaman modal	2 Investor	45.668.800
	Sub Kegiatan Penetapan Kebijakan Daerah mengenai Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	Jumlah Peraturan Daerah/Provinsi dalam Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	1 Dokumen	30.678.800
	Sub Kegiatan Evaluasi Pelaksanaan Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Memperoleh Insentif dan Kemudahan Berusaha di Daerah	2 Kegiatan Usaha	14.990.000
	Kegiatan Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen terkait peta potensi investasi	2 Dokumen	252.640.800
	Sub Kegiatan Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Peraturan Daerah (perda) Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	1 Dokumen	31.118.800
	Sub Kegiatan Penyediaan peta potensi dan peluang investasi Kabupaten/kota	Jumlah Peta Potensi Investasi dan Peluang Usaha Kabupaten/Kota	1 Dokumen	221.522.000
3	Program Promosi Penanaman Modal	Peningkatan jumlah sektor usaha yg dipromosikan	2 Sektor Usaha	424.843.800
	Kegiatan Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Peningkatan kegiatan promosi investasi	9 Kali	424.843.800
	Sub Kegiatan Penyusunan strategi promosi penanaman modal	Jumlah Peraturan Daerah yang Mengatur Promosi Penanaman Modal Kewenangan Kabupaten/Kota	1 Dokumen	
	Sub Kegiatan Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah/Kabupaten	Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kabupaten/Kota	2 Dokumen	424.843.800
4	Program Pelayanan Penanaman Modal	Persentase peningkatan jumlah izin yang diterbitkan	5%	198.516.200
	Kegiatan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Secara Terpadu Satu Pintu Dibidang Penanaman Modal yang Menjadi	Persentase peningkatan jumlah perizinan usaha yang terlayani	5%	198.516.200

NO	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN PERUBAHAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	ANGGARAN
	Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota			
	Sub Kegiatan Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	10.000 Pelaku Usaha	168.108.800
	Sub Kegiatan Pemantauan Pemenuhan Komitmen Perizinan dan Nonperizinan Penanaman Modal	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Mendapat Pemantauan Pemenuhan Komitmen Perizinan Berusaha dan Non Perizinan Penanaman Modal	50 Kegiatan Usaha	12.519.900
	Sub Kegiatan Penyediaan layanan konsultasi dan Pengelolaan pengaduan masyarakat terhadap pelayanan terpadu perizinan dan non perizinan	Jumlah Orang yang Memperoleh Layanan Konsultasi dan Terkelolanya Pengaduan Masyarakat Terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan	5 Orang	17.887.500
5	Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	Jumlah Realisasi Investasi s.d. Tahun (n)	13.500 Miliar	350.242.300
	Kegiatan Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang menjadi kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Proyek yang melaporkan kegiatan usahanya melalui LKPM	335 Proyek	350.242.300
	Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Pelaksanaan Penanaman Modal	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha Yang Melakukan Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Pelaksanaan Penanaman Modal	6 Kegiatan Usaha	9.400.000
	Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal	Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal	255 Pelaku Usaha	269.835.000
	Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Melakukan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan	25 Kegiatan Usaha	71.007.300
6	Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal	Persentase data yang tersedia tepat waktu	100%	111.703.400
	Kegiatan Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi Pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah laporan data perizinan, non perizinan dan penanaman modal	2 Laporan	111.703.400
	Sub Kegiatan Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Jumlah Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik yang Diolah, Dikaji dan Dimanfaatkan	4 Dokumen	111.703.400
TOTAL PAGU ANGGARAN				6.061.626.000

BAB IV P E N U T U P

Keberhasilan program dan kegiatan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Blitar tidak semata-mata ditentukan oleh hasil kerja keras karyawan/karyawati Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Blitar, tetapi sangat dipengaruhi oleh hasil kerja serta kontribusi positif berbagai pihak. Sebagai uraian penutup dari Perubahan Rencana Kerja (P-Renja) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Blitar Tahun 2023 dapat kami sampaikan beberapa hal sebagai berikut :

1. Penyusunan Rencana Kerja PD yang pada hakekatnya merupakan rencana capaian kinerja tahunan ini disusun dengan memperhatikan program dan kegiatan dalam Renstra Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Blitar serta mengacu Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) sebagaimana Nota Kesepakatan antara Bupati Blitar dengan Pimpinan DPRD.
2. Sesuai dengan RPJMD Kabupaten Blitar dan Rencana Strategis Perubahan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Blitar Tahun 2021-2026 maka ditetapkan Rencana Kerja tahunan serta kebijakan/strategi untuk mengerahkan segala potensi dan mengurangi keterbatasan/kendala yang ada dalam mencapai visi dan misi.
3. Bahwa Program dan Kegiatan yang tertuang pada P-Renja tahun 2023 ini dititikberatkan pada upaya peningkatan cakupan layanan dan kualitas pelayanan pada masyarakat Kabupaten Blitar dengan strategi memudahkan masyarakat dalam berinvestasi dan berizin di Kabupaten Blitar melalui Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Blitar.

Demikian Perubahan Rencana Kerja (P-Renja) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Blitar Tahun 2023 ini semoga dapat dijadikan acuan bagi seluruh pemangku kepentingan terkait, sehingga diharapkan dapat tercapai tujuan pembangunan daerah Kabupaten Blitar.

Blitar, Agustus 2023

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
LAYANAN TERPADU SATU PINTU



PUGUH IMAM SUSANTO, S.Sos., M.Si.

Pembina Utama Muda
NIP. 19701111 198903 1 004

LAMPIRAN

8/29/23, 8:58 AM

Sistem Informasi Pemerintahan Daerah - Cetak Renja

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Kabupaten Blitar Tahun 2023

Unit Organisasi : 2.18.0.00.0.00.01.0000 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Sub Unit Organisasi : 2.18.0.00.0.00.01.0000 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Lokasi Output Kegiatan	Rencana Tahun 2023						Sumber Dana	Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024									
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan		Target Capaian Kinerja								Sebelum	Setelah	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)					
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Sebelum	Setelah		Tolok Ukur	Target			
						Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah												
2																							
2	18																						
2	18	01																					
2	18	01	2.01																				
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																							
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL												6,061,626,000	6,061,626,000							7,664,804,631			
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA												4,605,686,300	4,678,010,700							5,035,314,971			
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah												10,375,000	10,375,000							16,896,128			
2	18	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Rata-rata tingkat capaian kinerja kegiatan pada program penunjang urusan pemerintahan daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Renstra, Renwal Renja, Renja, Renja Perubahan, Perkin, Perkin Perubahan, IKU, IKI, PPRG, Rencana Aksi Program Kegiatan, LPPD, LKJIP, LKPJ, Evaluasi RKPD, SAKIP dan PMPRB, Zona Integritas	Kab. Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 %	0 Dokumen	10 Dokumen	0 Dokumen	10 Dokumen	16 dokumen	16 dokumen	3,575,500	3,575,500	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Rata-rata tingkat capaian kinerja kegiatan pada program penunjang urusan pemerintahan daerah	100 %	10,263,620
2	18	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Rata-rata tingkat capaian kinerja kegiatan pada program penunjang urusan pemerintahan daerah	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Renstra, Renwal Renja, Renja, Renja Perubahan, Perkin, Perkin Perubahan, IKU, IKI, PPRG, Rencana Aksi Program Kegiatan, LPPD, LKJIP, LKPJ, Evaluasi RKPD, SAKIP dan PMPRB, Zona Integritas	Kab. Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 %	3 dokumen	3 dokumen	16 dokumen	16 dokumen	4,999,500	4,999,500	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Rata-rata tingkat capaian kinerja kegiatan pada program penunjang urusan pemerintahan daerah	100 %	6,612,500		
2	18	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah																		
2	18	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Rata-rata tingkat capaian kinerja kegiatan pada program penunjang urusan pemerintahan daerah	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Laporan keuangan semesteran	Kab. Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 %	30 Orang/bulan	30 Orang/bulan	3 laporan	3 laporan	3,276,693,244	3,276,693,520	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Rata-rata tingkat capaian kinerja kegiatan pada program penunjang urusan pemerintahan daerah	100 %	4,022,194,150		
2	18	01	2.02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Rata-rata tingkat capaian kinerja kegiatan pada program penunjang urusan pemerintahan daerah	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Laporan keuangan semesteran	Kab. Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 %	12 Dokumen	12 Dokumen	3 laporan	3 laporan	26,600,000	26,600,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Rata-rata tingkat capaian kinerja kegiatan pada program penunjang urusan pemerintahan daerah	100 %	49,435,050		

https://blitar.kab.slpd.kemendagri.go.id/daerah/main?dz2pPbl/13PjVq2uJL0633xjeR0HpnHFk44n05n4NWHclDxw@LP2LNo3BZnZzeRKTb7FSwrTs@336dEu4aRj2SN59K9M6ALz6T1109ueWaL0L56JwF0AA1tBA5Hh9OwS0@tR@Gf9Yw2smYg1CNZxlpXFn0hg3TXZJkHfW61q0o8FvMUWwR6vgGqU5axfkgw... 1/7

**Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Blitar
Tahun 2023**

Unit Organisasi : 2.18.0.00.0.00.01.0000 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Sub Unit Organisasi : 2.18.0.00.0.00.01.0000 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2023										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024					
		Indikator Kinerja			Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja							Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)		
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan		Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan				Pagu Indikatif (Rp.)			Tolok Ukur	Target
						Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah			Sebelum	Sesudah			
2.18.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Rata-rata tingkat capaian kinerja kegiatan pada program penunjang urusan pemerintahan daerah	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	pelaksanaan administrasi umum	Kab. Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 %	360 Dokumen	360 Dokumen	12 bulan	12 bulan	1,000,000	2,352,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Rata-rata tingkat capaian kinerja kegiatan pada program penunjang urusan pemerintahan daerah	100 %	2,300,500	
2.18.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Rata-rata tingkat capaian kinerja kegiatan pada program penunjang urusan pemerintahan daerah	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	pelaksanaan administrasi umum		100 %	100 %	25 Laporan	25 Laporan	12 bulan	12 bulan	166,462,000	236,290,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Rata-rata tingkat capaian kinerja kegiatan pada program penunjang urusan pemerintahan daerah	100 %	90,526,365	
2.18.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah										149,199,200	160,971,200						95,334,313
2.18.01.2.07.05	Pengadaan Mebel	Rata-rata tingkat capaian kinerja kegiatan pada program penunjang urusan pemerintahan daerah	Jumlah unit Mebel yang Disediakan	laptop, komputer, printer, scanner	Kab. Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 %	4 Unit	4 Unit	4 jenis	4 jenis	6,961,000	16,717,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Rata-rata tingkat capaian kinerja kegiatan pada program penunjang urusan pemerintahan daerah	100 %	10,000,000	
2.18.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Rata-rata tingkat capaian kinerja kegiatan pada program penunjang urusan pemerintahan daerah	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	laptop, komputer, printer, scanner	Kab. Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 %	6 Unit	6 Unit	4 jenis	4 jenis	140,216,200	144,254,200	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Rata-rata tingkat capaian kinerja kegiatan pada program penunjang urusan pemerintahan daerah	100 %	85,334,313	
2.18.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah										473,919,356	431,156,280						440,128,000
2.18.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Rata-rata tingkat capaian kinerja kegiatan pada program penunjang urusan pemerintahan daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kab. Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 %	2 Laporan	2 Laporan	12 bulan	12 bulan	1,963,600	2,741,600	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Rata-rata tingkat capaian kinerja kegiatan pada program penunjang urusan pemerintahan daerah	100 %	2,645,000	

**Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Blitar
Tahun 2023**

Unit Organisasi : 2.18.0.00.0.00.01.0000 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Sub Unit Organisasi : 2.18.0.00.0.00.01.0000 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja				Rencana Tahun 2023								Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024				
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja				Sumber Dana	Catatan Penting	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)				
						Program		Keluaran Sub Kegiatan				Hasil Kegiatan			Pagu Indikatif (Rp.)			
						Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah			Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah	Tolok Ukur	Target
2.18.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Rata-rata tingkat capaian kinerja kegiatan pada program penunjang urusan pemerintahan daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kab. Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 %	2 Laporan	2 Laporan	12 bulan	12 bulan	81,158,400	81,158,400	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Rata-rata tingkat capaian kinerja kegiatan pada program penunjang urusan pemerintahan daerah	100 %	105,800,000
2.18.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Rata-rata tingkat capaian kinerja kegiatan pada program penunjang urusan pemerintahan daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kab. Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 %	2 Laporan	2 Laporan	12 bulan	12 bulan	390,777,270	347,256,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Rata-rata tingkat capaian kinerja kegiatan pada program penunjang urusan pemerintahan daerah	100 %	331,053,000
2.18.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah											399,167,000	378,108,000					203,058,725
2.18.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Rata-rata tingkat capaian kinerja kegiatan pada program penunjang urusan pemerintahan daerah	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Pemeliharaan Sarpras	Kab. Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 %	5 Unit	5 Unit	12 bulan	12 bulan	72,210,000	72,210,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Rata-rata tingkat capaian kinerja kegiatan pada program penunjang urusan pemerintahan daerah	100 %	139,933,725
2.18.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Rata-rata tingkat capaian kinerja kegiatan pada program penunjang urusan pemerintahan daerah	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Pemeliharaan Sarpras	Kab. Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 %	60 Unit	60 Unit	12 bulan	12 bulan	70,698,000	70,698,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Rata-rata tingkat capaian kinerja kegiatan pada program penunjang urusan pemerintahan daerah	100 %	36,675,000
2.18.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Rata-rata tingkat capaian kinerja kegiatan pada program penunjang urusan pemerintahan daerah	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Pemeliharaan Sarpras	Kab. Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 %	2 Unit	2 Unit	12 bulan	12 bulan	256,059,600	235,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Rata-rata tingkat capaian kinerja kegiatan pada program penunjang urusan pemerintahan daerah	100 %	26,430,000
2.18.02	PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL											325,354,800	298,309,600					410,293,235
2.18.02.2.01	Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota											68,374,000	45,668,800					132,568,235

**Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Bitar
Tahun 2023**

Unit Organisasi : 2.18.0.00.0.00.01.0000 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Sub Unit Organisasi : 2.18.0.00.0.00.01.0000 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Kode	Usuran/ Bidang Usuran/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Capaian Program	Keuangan Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Rencana Tahun 2023						Sumber Dana	Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024			
							Target Capaian Kinerja				Pagu Indikatif (Rp.)				Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)	
							Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan				Sebelum	Sesudah		Tolok Ukur
							Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah						
2.18.02.2.01.01	Penetapan Kebijakan Daerah Mengenai Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	Persentase peningkatan penanam modal yang mendapatkan fasilitas/ insentif dan kemudahan penanaman modal	Jumlah Peraturan Daerah/Provinsi dalam Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	penanam modal mendapatkan fasilitas/insentif dan kemudahan penanaman modal	Kab. Bitar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	0,02 %	0,02 %	1 Dokumen	1 Dokumen	2 investor	2 investor	50,734,000	30,678,800	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase peningkatan penanam modal yang mendapatkan fasilitas/ insentif dan kemudahan penanaman modal	0,02 %	99,187,500	
2.18.02.2.01.02	Evaluasi Pelaksanaan Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	Persentase peningkatan penanam modal yang mendapatkan fasilitas/ insentif dan kemudahan penanaman modal	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Memperoleh Insentif dan Kemudahan Berusaha di Daerah	penanam modal meridapatkan fasilitas/insentif dan kemudahan penanaman modal	Kab. Bitar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	0,02 %	0,02 %	2 Kegiatan Usaha	2 Kegiatan Usaha	2 investor	2 investor	17,640,000	14,990,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase peningkatan penanam modal yang mendapatkan fasilitas/ insentif dan kemudahan penanaman modal	0,02 %	33,380,735	
2.18.02.2.02	Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota											256,980,800	252,640,800				277,723,000	
2.18.02.2.02.01	Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	Persentase peningkatan penanam modal yang mendapatkan fasilitas/ insentif dan kemudahan penanaman modal	Jumlah Peraturan Daerah (Perda) Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	dokumen Kegiatan Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	Kab. Bitar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	0,02 %	0,02 %	1 Dokumen	1 Dokumen	2 dokumen	2 dokumen	31,118,800	31,118,800	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase peningkatan penanam modal yang mendapatkan fasilitas/ insentif dan kemudahan penanaman modal	0,02 %	105,800,000	
2.18.02.2.02.02	Penyediaan Peta Potensi dan Peluang Usaha Kabupaten/Kota	Persentase peningkatan penanam modal yang mendapatkan fasilitas/ insentif dan kemudahan penanaman modal	Jumlah Peta Potensi Investasi dan Peluang Usaha Kabupaten/Kota	dokumen Kegiatan Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	Kab. Bitar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	0,02 %	0,02 %	2 Dokumen	2 Dokumen	2 dokumen	2 dokumen	225,862,000	221,522,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase peningkatan penanam modal yang mendapatkan fasilitas/ insentif dan kemudahan penanaman modal	0,02 %	171,923,000	
2.18.03	PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL											424,843,800	424,843,800				694,632,068	
2.18.03.2.01	Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota											424,843,800	424,843,800				694,632,068	
2.18.03.2.01.01	Penyusunan Strategi Promosi Penanaman Modal	Peningkatan jumlah sektor usaha yg dipromosikan	Jumlah Peraturan Daerah yang Mengatur Promosi Penanaman Modal Kewenangan Kabupaten/Kota	Penyelenggaraan Kegiatan Promosi	Kab. Bitar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	2 Sektor Usaha	2 Sektor Usaha	1 Dokumen	1 Dokumen	1 kali	1 kali	0	0	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Peningkatan jumlah sektor usaha yg dipromosikan	2 Sektor Usaha	165,632,068	

**Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Blitar
Tahun 2023**

Unit Organisasi : 2.18.0.00.0.00.01.0000 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Sub Unit Organisasi : 2.18.0.00.0.00.01.0000 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Kode	Usuran/ Bidang Usuran/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja				Rencana Tahun 2023								Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024			
		Capaian Program	Keuangan Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja				Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)			
						Program		Hasil Kegiatan		Sebelum	Sesudah		Sebelum			Sesudah	Tolok Ukur	Target
						Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah									
2.18.03.2.01.02	Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	Peningkatan jumlah sektor usaha yg dipromosikan	Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kabupaten/Kota	Penyelenggaraan Kegiatan Promosi	Kab. Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	2 Sektor Usaha	2 Sektor Usaha	2 Dokumen	2 Dokumen	1 kali	1 kali	424,843,800	424,843,800	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Peningkatan jumlah sektor usaha yg dipromosikan	2 Sektor Usaha	529,000,000	
2.18.04	PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL											178,516,200	198,516,200		326,608,575			
2.18.04.2.01	Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota											178,516,200	198,516,200		326,608,575			
2.18.04.2.01.01	Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Nonperizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Persentase peningkatan jumlah izin yang diterbitkan	Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Jumlah izin masuk tahun (n) dikurangi Jumlah izin masuk tahun (n-1) dibagi Jumlah izin masuk tahun (n-1) dikali 100	Kab. Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	5 %	5 %	10000 Pelaku Usaha	10000 Pelaku Usaha	5 %	5 %	148,108,800	168,108,800	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase peningkatan jumlah izin yang diterbitkan	5 %	198,375,000	
2.18.04.2.01.02	Pemantauan Pemenuhan Komitmen Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal	Persentase peningkatan jumlah izin yang diterbitkan	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Mendapat Pemantauan Pemenuhan Komitmen Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal	Jumlah izin masuk tahun (n) dikurangi Jumlah izin masuk tahun (n-1) dibagi Jumlah izin masuk tahun (n-1) dikali 100	Kab. Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	5 %	5 %	50 Kegiatan Usaha	50 Kegiatan Usaha	5 %	5 %	12,519,900	12,519,900	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase peningkatan jumlah izin yang diterbitkan	5 %	63,733,575	
2.18.04.2.01.03	Penyediaan Layanan Konsultasi dan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat Terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan	Persentase peningkatan jumlah izin yang diterbitkan	Jumlah Orang yang Memperoleh Layanan Konsultasi dan Terkelolanya Pengaduan Masyarakat Terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan	Jumlah izin masuk tahun (n) dikurangi Jumlah izin masuk tahun (n-1) dibagi Jumlah izin masuk tahun (n-1) dikali 100	Kab. Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	5 %	5 %	5 Orang	5 Orang	5 %	5 %	17,887,500	17,887,500	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase peningkatan jumlah izin yang diterbitkan	5 %	264,500,000	
2.18.05	PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL											350,242,300	350,242,300		806,557,135			
2.18.05.2.01	Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota											350,242,300	350,242,300		806,557,135			

**Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Blitar
Tahun 2023**

Unit Organisasi : 2.18.0.00.0.00.01.0000 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Sub Unit Organisasi : 2.18.0.00.0.00.01.0000 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Program	Indikator Kinerja		Lokasi Output Kegiatan	Rencana Tahun 2023						Sumber Dana	Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024			
			Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan		Target Capaian Kinerja				Pagu Indikatif (Rp.)				Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)		
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Sebelum	Sesudah
						Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah						
2.18.05.2.01.01	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Pelaksanaan Penanaman Modal	Jumlah Realisasi Investasi s.d. Tahun (n)	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Melakukan Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Pelaksanaan Penanaman Modal	Perusahaan Melaporkan Kegiatan Usahnya melalui LKPM	Kab. Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	11700 Milya r	11700 Milya r	6 Kegiatan Usaha	6 Kegiatan Usaha	1700 perusahaan	1700 perusahaan	9,400,000	9,400,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Non Fisik	Jumlah Realisasi Investasi s.d. Tahun (n)	11700 Milya r	198,207,135
2.18.05.2.01.02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal	Jumlah Realisasi Investasi s.d. Tahun (n)	Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal	Perusahaan Melaporkan Kegiatan Usahnya melalui LKPM		11700 Milya r	11700 Milya r	255 Pelaku Usaha	255 Pelaku Usaha	1700 perusahaan	1700 perusahaan	269,635,000	269,635,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Non Fisik	Jumlah Realisasi Investasi s.d. Tahun (n)	11700 Milya r	423,200,000
2.18.05.2.01.03	Koordinasi dan sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal	Jumlah Realisasi Investasi s.d. Tahun (n)	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Melakukan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan	Perusahaan Melaporkan Kegiatan Usahnya melalui LKPM		11700 Milya r	11700 Milya r	25 Kegiatan Usaha	25 Kegiatan Usaha	1700 perusahaan	1700 perusahaan	71,007,300	71,007,300	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Non Fisik	Jumlah Realisasi Investasi s.d. Tahun (n)	11700 Milya r	165,150,000
2.18.00		PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL										176,982,400	111,703,400				191,398,647
2.18.00.2.01		Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota										176,982,400	111,703,400				191,398,647
2.18.06.2.01.01	Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Persentase data yang tersedia tepat waktu	Jumlah Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik yang Diolah, Dikaji dan Dimanfaatkan	Laporan Data Perizinan, Non Perizinan dan Penanaman Modal	Kab. Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 %	4 Dokumen	4 Dokumen	2 laporan	2 laporan	176,982,400	111,703,400	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase data yang tersedia tepat waktu	100 %	191,398,647
						TOTAL						6,001,626,000	6,001,626,000				7,664,804,631